



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.845, 2017

KEMENDAG. Dekonsentrasi TA 2017. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-DAG/PER/6/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2017, perlu mengubah alokasi dana dekonsentrasi pada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, dan Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2017 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1835);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 368);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 368) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/M-DAG/PER/6/2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2017
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA
 GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI TAHUN 2017

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	1,651,764,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	986,352,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	665,412,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATAN PASAR MURAH 3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA 7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 ADMINISTRASI UMUM 2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 3 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG 4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE 5 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA 6 DUKUNGAN UNTUK P3ED 7 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK 8 PELATIHAN EKSPOR 9 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI 10 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	3,434,653,889 1,941,582,889
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATAN PASAR MURAH 3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA 7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 8 PASAR LELANG PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 ADMINISTRASI UMUM	1,886,825,000 1,142,342,000 744,483,000

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		8 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	1,813,775,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,102,809,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	710,966,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		8 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
5	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	3,414,781,889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,868,332,889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,546,449,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		5 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		6 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		7 PELATIHAN EKSPOR	
		8 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		9 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
6	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	1,498,427,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	873,136,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	625,291,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
7	GUBERNUR KEP. BANGKA BELITUNG	KEP. BANGKA BELITUNG	1,275,367,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	771,343,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	504,024,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
8	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	3,270,041,039
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,137,815,889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,132,225,150
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
9	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATAN PASAR MURAH 3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA 7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 ADMINISTRASI UMUM 2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE 4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA 5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK 6 PELATIHAN EKSPOR 7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	1,659,340,000 1,084,117,000
10	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD) 2 KEGIATAN PASAR MURAH 3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA 5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH 6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA 7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 8 PASAR LELANG PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 ADMINISTRASI UMUM 2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI 3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA 4 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	1,904,558,000 1,183,280,000 721,278,000

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	691,630,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	150,000,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	541,630,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 PELATIHAN EKSPOR	
		5 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
12	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	1,456,129,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	756,498,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	699,631,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
13	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	2,070,750,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,369,413,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	701.337,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
14	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	2,154,573,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,419,796,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	734.777,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 PARTISIPASI PADA PAMERAN DALAM NEGERI LAINNYA	
		5 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		6 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
15	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	2,117,372,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,419,939,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	697,433,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PARTISIPASI PADA PAMERAN DALAM NEGERI LAINNYA	
		6 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
16	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	4,322,997,889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,670,793,889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,652,204,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 DUKUNGAN UNTUK P3ED	
		6 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		7 PELATIHAN EKSPOR	
		8 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		9 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
17	GUBERNUR BALI	BALI	1,956,082,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,333,861,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	622,221,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		5 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	3,736,961,039
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,245,512,889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,491,448,150
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	550,963,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
21	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	1,735,006,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,196,048,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	538,958,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
22	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	3,457,618,889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,059,166,889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,398,452,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
23	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	1,719,580,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	835,612,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	883,968,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 PARTISIPASI PADA PAMERAN DALAM NEGERI LAINNYA	
		5 DUKUNGAN UNTUK P3ED	
		6 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		8 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
24	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	3,575,394,889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,127,961,889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,447,433,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		8 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
25	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	1,439,840,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	934,315,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	505,525,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
26	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	3,157,678,889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,914,101,889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,243.577,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
27	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	1,799,297,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,299,313,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	499,984,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
28	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	1,382,006,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	847,046,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	534,960,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
29	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	4,055,559,589
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2,517,362,889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,538,196,700
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 DUKUNGAN UNTUK P3ED	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		8 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
30	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	1,835,777,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,276,283,000

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	559,494,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	1,568,896,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,027,827,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	541,069,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	1,427,975,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	966,998,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	460,977,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	1,959,009,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,159,225,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	799,784,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	2,092,125,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,076,117,000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1,016,008,000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ENGGARTIASTO LUKITA